

MENDIALOGKAN AGAMA: REFLEKSI KRITIS PEMIKIRAN TH. SUMARTANA

Rahmasita Sekar Lumingga

Sosiologi Fisip, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
rahmasita123@gmail.com

M. Alie Humaedi

Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, BRIN, Jakarta, Indonesia
aliehumaedi@yahoo.com

Judul : Demokrasi Indonesia: Persimpangan Antara Pluralisme Agama dan Politik Negara (Pemikiran Th. Sumartana tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan)
Penulis : Pdt. Victor Rembeth
Kata Sambutan : ST. Sunardi
Penerbit : Institut DIAN/INTERFIDEI, Yogyakarta
Cetakan I : Mei 2023
Tebal : xxxvi + 310 halaman



Copyright of Harmoni: The Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

Abstrak

Dalam upaya menghidupi buah pemikiran Th Sumartana sebagai usaha dekonstruksi identitas protestan di Indonesia, buku ini menguraikan bagaimana agama berhadapan dengan para tiran pemerintah dan tiran agama. Buku ini mampu menggaris-besari persimpangan pluralisme agama dengan politik secara runtut dengan menelisik jejak-jejak sejarah mulai dari dinamika identitas Protetanisme era kolonialisme, proses hibriditas era kemerdekaan, pergolakan era orde baru hingga era masa kini terkait eskalasi Gerakan Sosial Baru. Dalam upaya membangun kohesivitas perlu ada mekanisme sosial dan politik kenegaraan. Untuk itu, dialog keagamaan bukan sekadar hadir pada kelompok-kelompok penganut agama saja, tetapi juga melibatkan negara dalam mengafirmasi toleransi dan moderasi keagamaan sesuai corak masyarakat Indonesia. Proses inilah yang memungkinkan “partisipasi warga” sebagai prasyarat utama demokrasi perlu ditelisik lebih komprehensif. Pertanyaan “Siapa mengatur siapa?” pada konteks demokrasi dalam dialog agama menjadi persoalan pemantik yang membuka celah penasaran. Buku ini mendiskusikan perang posisi antara agama dan negara serta antar agama dan agama lainnya yang dikemas holistik dengan pendekatan historiografi sehingga memicu penasaran untuk segera menuntaskan membaca buku hingga akhir.

Kata Kunci: Dialog Agama, Pluralisme Agama, Agama dan Politik

PENDAHULUAN

Isu toleransi dan moderasi beragama menjadi isu aktual ditengah kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural. Dalam persoalan keagamaan, pengakuan negara atas enam agama dan ratusan kepercayaan saja menjadi

bukti bahwa negara telah mengakui keragaman keagamaan tersebut. Artinya, di dalam upaya membangun “saling pengertian” dan “kehidupan bersama” perlu ada mekanisme sosial dan politik kenegaraan. Oleh karena itulah, dialog keagamaan bukan sekadar keniscayaan pada kelompok-kelompok penganut agama saja, tetapi juga negara harus hadir dan mampu mengafirmasi toleransi dan moederasi keagamaan dalam beragam bentuk yang dianggap sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Proses inilah yang memungkinkan “partisipasi warga” sebagai prasyarat utama demokrasi perlu ditelisik lebih komprehensif.

Pertanyaan pada konteks demokrasi dalam dialog agama itu, adalah “Siapa mengatur siapa?” Pertanyaan ini menjadi persoalan pemantik yang membuka celah penasaran pada bab pendahuluan buku ini. Jembatan macam apa yang dapat dibangun antara agama dan negara? Manifestasi pemikiran macam apa yang dapat menjembatani pluralitas agama dan negara? Buku ini mendiskusikan perang posisi antara agama dan negara serta antar agama dan agama lainnya yang dikemas holistik dengan pendekatan historiografi sehingga memicu penasaran pembaca segera menuntaskan membaca buku hingga akhir. Buku ini dilahirkan sebagai penyegaran dan menghidupi pemikiran Th Sumartana guna membakar kembali semangat penggiat isu toleransi dalam pluralitas beragama, berjudul *Demokrasi Indonesia: Persimpangan Antara Pluralisme Agama dan Politik Negara* (Pemikiran Th. Sumartana tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) karya Pdt. Victor Rembeth, seorang pendeta Gereja Baptis Indonesia sekaligus praktisi kemanusiaan dan gerakan antar-iman. Aktif pula sebagai founder Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Penulisan buku berawal dari kisah pencarian gelar saat berkuliah di program Ilmu Religi Budaya, Universitas Sanata Dharma 2007.

Bagian-bagian isi buku ini disusun menjadi enam bab meliputi, Bab satu pendahuluan berisi latar belakang membahas dinamika agama sebagai sistem kepercayaan komunitas dan negara sebagai institusi pengatur kehidupan komunitas, serta dijabarkan pula rancangan isi buku. Bab dua, merupakan usaha kritis memahami pemikiran Sumartana terkait esensi dialog agama-agama dan implementasinya. Bab tiga, menggaris besari jejak-jejak sejarah mulai dari dinamika identitas Protetanisme era kolonialisme oleh *Zending*, proses hibriditas era pra dan pasca kemerdekaan, pergolakan era Orde Baru. Bab empat, membahas masalah agama dan negara dalam bingkai konsep politik Indonesia. Bab lima, membahas relevansi pemikiran Sumartana dalam menghadirkan dialog agama-agama pada era masa kini melalui eskalasi Gerakan Sosial Baru.

Terinspirasi dari buah pemikiran Sumartana yang merupakan upaya dekonstruksi identitas protestan di Indonesia, buku ini mengawali argument terkait bagaimana agama berhadapan dengan para tiran elit pemerintah, dan celaknya pula para tiran agama. Victor Rembeth dalam buku ini menyinggung Konsep Hobbesian yaitu negara sebagai koordinator kepentingan dan pemegang kendali berbagai persoalan dalam masyarakat, membentuk dominasi dalam

perang posisi antara agama dan negara. Dominasi negara terhadap agama ini bermuara pada sebuah intervensi kekuasaan terhadap ruang-ruang bersama yang seharusnya menjadi pilihan kreatif dan hak demokratis masyarakat. Dominasi mengubah makna kesepakatan menjadi keterpaksaan. Situasi diperparah oleh prakondisi yang menyebabkan prasangka bahwa Kristen sebagai agama penjajah berupaya mengkristenkan umat Islam, sebaliknya orang Kristen curiga bahwa islamisasi akan membatasi kebebasan beragama mereka. Dalam konteks ini, isi buku menawarkan pemikiran Sumartana yang mengibaratkan peran agama sebagai roh yang mentransformasikan kecarut-marutan dominasi negara terhadap warganya.

PEMBAHASAN

Buku ini memaknai interaksi agama dalam realitas memunculkan berkah sekaligus bencana. Konflik di Indonesia sering diasumsikan akibat dari ketidakrukunan penganut agama yang mengancam pluralitas. Intoleransi ini dilandasi oleh (1) Konflik sebagai hasil “beban sejarah” yang melekat pada agama memunculkan sikap merasa paling benar. Hal-hal ini secara psikologis menghasilkan pandangan teologis yang rawan konflik. (2) Konsep membanggakan superioritas berdasarkan jati diri/identitas “self” yang mendominasi “other” akan semakin menjauhkan peran agama dalam melahirkan demokratisasi.

Berbicara tentang “beban sejarah” agama, buku ini mengurai benang kebelakang ketika zaman penyiaran agama-agama pendatang melalui kolonialisme barat sebagai upaya awal kristenisasi Indonesia. Hadirnya pendeta pertama yang dikirim bukan untuk umat Eropa melainkan mengkristenkan para bumiputera. Penerjemahan kitab suci ke bahasa lokal. Latar belakang misiologi gereja dan munculnya organisasi *Zending* yang mengirim misionaris ke tanah Jawa, yang ikut mewarnai kerumitan kristenisasi sebab mengharuskan pribumi meniru gaya hidup misionaris termasuk melepaskan kepercayaan masa lalu, tradisi dan nilai-nilai kesukuan mereka (Sumartana, 1993). Misionaris Belanda lebih menjunjung kemurnian dogma daripada memperhatikan adaptasi pembaharuan rohani atas orang Kristen Jawa. Dari sini muncul lah predikat *londo wurung jowo tanggung* dan dicap sebagai agama penjajah (Sumartana, 2003). Hingga konflik alienasi Kristen lokal dimana tercipta dua kutub Kristen *londo* (para *Zending*) dan Kristen Jawa (Kiai Sadrach).

Keterikatan kepentingan politik negara, pandangan superior misionaris *londo*, dan persaingan dengan Kiai Sadrach yang dianggap “guru penyesat” oleh Belanda menjadi pembelajaran penting terkait akar masalah penyebaran agama di Indonesia. Kendati dituduh sesat, nyatanya teologi spiritualitas yang dibangun Sadrach adalah bentuk *hybrid* dari Protestan barat dan realitas keagamaan Jawa yang merepresentasikan jati diri Kristen lokal. Sadrach memiliki keunggulan kharisma dan kemahiran dalam berdebat mengenai Ngelmu Kristen. Ia menguraikan makna Ngelmu Injil (atau disebutnya ngelmu sejati)

yang mudah dicerna oleh para pendengarnya sekaligus menjawab kebutuhan mereka tentang jalan keselamatan (Nggebu, 2023). Jadi selain memasukkan unsur adopsi nilai-nilai budaya Jawa dan kemampuan teologi yang kuat, Sadrach juga mencermati *need assessment* sehingga berhasil menawarkan model pendekatan yang krusial dibutuhkan oleh masyarakat Jawa masa itu. Sadrach menghadirkan Protetanisme bercorak tradisi adat istiadat setempat sehingga mereka tidak terlalu jauh melompat ke cara hidup yang baru (Gultom, 2021). Identitas protestan yang dibangun Sadrach dan kelompoknya potensial menjadi sebuah model harapan untuk identitas yang bisa mewakili eksistensi gereja yang lepas dari beban sejarah agama Barat. Sepeninggalan Sadrach komunitas Kristen Jawa hilang arah, kembalinya mereka ke bimbingan *Zending* menjadikan penerusnya saat ini yaitu GKJ telah kehilangan jati diri Kristen Jawa karya Sadrach dan memupuk ketergantungan spiritual dan sosial jemaat pada *Zending*. Dari sini stereotype agama penjajah perlu dibedakan dengan agama Kristen fase pribumisasi sehingga mampu hidup dengan identitas bangsa.

Meneropong Demokrasi Pluralisme dalam Konteks Perjalanan Bangsa Indonesia

Negara Indonesia sejak awal mengikuti paham nasionalisme telah mengakui kemajemukan dengan menganut kepelbagaian sebagai komitmen bersama. Perubahan sila pertama Piagam Djakarta yang Islami menjadi sila pertama Pancasila, jaminan keragaman agama dalam UUD 1945 membuktikan sejak lahir Indonesia dirancang oleh pendiri bangsa dalam bingkai pluralitas. Namun komitmen awal mulai goyah memasuki rezim kepemimpinan. Rezim Orde Lama melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang membatasi agama mencari jati dirinya. Negara memiliki porsi kekuasaan terlalu besar terhadap agama dengan alasan mengatur kerukunan, pembangunan, keamanan, dan ketertiban. Ketidaktegasan bentuk negara (Islam atau sekuler) dan kompromi berkelanjutan oleh rezim menjadikan agama diperlakukan sebagai pion kepentingan kekuasaan. Indonesia sejak awal mewarisi kebijakan-kebijakan ranah agama tinggalkan dua rezim penjajah, selanjutnya mewariskan persoalan-persoalan keagamaan yang dilanjutkan para penguasa.

Rezim Orde Baru meneruskan model kekuasaan ini dan sejak awal kental dengan penggunaan agama sebagai media pencapaian kekuasaan dan titik konflik bernuansa agama. Ditandai pada pertentangan militer dengan PKI yang disinyalir komunis dengan melibatkan elemen Islam dan agama lain sebagai pihak penentang. PKI diidentikkan ateisme yang menjadi musuh seluruh agama. Terminologi “kerukunan” yang diusung KH Muhammad Dahlan Menteri Agama saat itu menjadi batas diakuinya agama tertentu yang sah menurut negara, dalam arti lain mengabaikan agama, kepercayaan lokal, suku dan lainnya. Sampai dititik mana agama bisa diatur dan diakui sah dimata negara menunjukkan semakin besar “kekuasaan” Negara terhadap agama. Hal ini telah memantik polemik pluralisme.

Stigma kelompok agama dipoles menjadi pembenaran keterlibatan pemerintah dalam ranah agama. Awal 80-an peristiwa Priok dan sejenisnya memframing ulama Islam sebagai momok yang mengancam stabilitas nasional melalui ceramah yang provokatif dan dituding anti-pancasila. Beberapa isu yang muncul sebagai bukti tindakan represif negara terhadap Islam ini menggiring asumsi mengenai kedekatan negara dengan pihak Kristen. Memasuki 90-an, tindakan represif terhadap Islam berubah menjadi “revivalisme” Islam melalui ICMI yang semakin meningkatkan partisipasi umat Islam dalam politik. Buah dari ini adalah konflik Ambon, Poso, dan Maluku. Konflik-konflik ini membukakan pintu pemerintah untuk mengambil kemudi dalam mendefinisikan relasi beragama. Dalam bingkai besar dialog antar-agama semacam ini maka umat agama di Indonesia perlu mencari bentuk alat transformasi guna menguatkan demokratisasi terhadap nilai-nilai plural.

Agama tidak seharusnya dipertentangkan dengan agama lain untuk dieksploitasi Negara guna menindas keduanya (Sumartana, 2002), memanfaatkan yang satu untuk menghancurkan yang lain, melainkan agama seharusnya mampu menjadi aliansi front persatuan atas dasar panggilan kemanusiaan yang sama dalam menjaga relasi kritis demokrasi.

Esensi Dialog, Koalisi Lintas-Agama/Keyakinan sebagai Kekuatan Transformatif Demokratisasi Negara

Buku ini memberikan pemahaman hubungan antara pokok pikiran Sumartana sebagai teolog Kristen Protestan dengan konteks pergumulan keIndonesiaannya pada era Orde Baru 1965 hingga 1990. Mengangkat keresahan-keresahan yang diakibatkan eksploitasi agama oleh negara. Apakah dengan menjadi pluralis ia bebas mengekspresikan diri dalam suatu koalisi lintas-agama?

Dialog agama-agama dan keyakinan menjadi unsur penting dan berpengaruh ketika hasilnya mampu menjadi roh kekuatan transformatif yang menghadirkan demokrasi menuju masyarakat emansipatoris. Bagi Sumartana agama bukan apa-apa jika tidak memiliki makna untuk kemanusiaan. Masa Orde Baru menjadi contoh nyata pencideraan peran agama secara dialogis, negara secara gamblang mengambil berbagai sikap untuk keagamaan warga negaranya. Maka bagi Sumartana kekuatan dialog antar-agama menjadi wadah relasi kritis yang berbicara mengenai kemanusiaan. Merekonstruksi ide bahwa negara tidak hanya berlaku sebagai penguasa yang memanipulasi agama demi kepentingan politik dan agama tidak hanya sebagai cap pembenaran. Dialog bukan monolog yang dilakukan banyak orang, tapi hubungan timbal balik yang memunculkan diskursus yang menantang kesadaran para penganut agama. Melalui model hubungan seperti ini maka terbangunlah jembatan kerjasama antar agama.

Beralih dari tantangan eliminasi dan pencatutan menang-kalah. Buku juga membahas tantangan berdialog di era masa kini yang tercermin ketika: (1) Orang

tidak lagi bertanya apa-bagaimana, tapi siapa-dimana. Perangkap identitas: “siapa saya” dan “dari narasi apa saya berada”. Mentalitas bahwa memeluk agama sama dengan membentuk sifat fundamentalisme yang bernuansa eksklusif terhadap identitas agamanya tetap menjamur dalam setiap era. Pada gilirannya, klaim kebenaran yang eksklusif atau fundamentalisme akan mengarah pada mentalitas *ghetto* (Sumartana, 2003) dan menghalangi upaya membangun masyarakat yang demokratis. (2) Intervensi negara dan kooptasi terhadap agama sebab elit penguasa memahami betul skema memakai agama untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Agama ditawan untuk melayani kekuasaan elit politik dan kehilangan independensinya. Oleh karenanya, Sumartana mengatakan dialog antar-agama bisa berperan menciptakan suasana komunikasi untuk membuat manusia menjadi manusia. Kualitas dialog agama-agama tercapai apabila para anggota terbuka, responsif dan kooperatif dengan siapapun tanpa diskriminasi (Kaha, 2020).

Kemudian tumbuhnya gerakan sosial baru atau koalisi lintas-iman mulai tahun 1990 hingga sekarang. Trademark produk pemikiran Sumartana “roh dialog” diwujudkan dengan dilahirkannya Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei) yang dihidupinya. Organisasi semacam Interfidei menggiati pemikiran-pemikiran plural dan petisi penolakan terhadap wacana negara yang mengusung konflik berbau agama serta menangkai gerakan radikal. Gerakan sosial baru lintas-agama bukan hanya pemikir atau akademikus melainkan aktivis untuk apa yang diyakini benar, perihal dialog agama-agama yang melahirkan demokratisasi. Ide dan pemikiran tidak hanya berhenti pada diskusi akademis, namun direalisasikan ke dalam praksis nyata dalam tataran aksi. Bagi Sumartana dialog tidak berhenti pada percakapan saja tapi ditindaklanjuti sebagai gaya hidup. Seperti tujuannya mendirikan Interfidei sebagai wahana hidup, berfikir, dan bekerja sama.

Figur Kunci Dialog dalam Konteks Keindonesiaan bagi Sumartana

Tokoh Kartini bagi Sumartana mendasari model dialog yang lahir dari basis lokal, dialog yang “pribumi” dengan menampilkan sisi keagamaan kuat. Sumartana mengistilahkan sebagai model sinkretisme. Kartini merupakan teladan yang eksemplaris bagi para pelaku dialog yang mempunyai pendirian dan pijakan kukuh kepada keyakinan sendiri (Sumartana, 1994). Kartini tidak menyamakan perbedaan yang ada pada agama-agama tapi menempatkan dalam perspektif praktis, sebagai jawaban sikap fundamentalisme dan eksklusif.

Setelah membaca habis buku ini, yang mengejutkan adalah meskipun berfokus hanya pada pemikiran tokoh agama Kristen Protestan, buku ini sangat potensial membakar semangat penggiat isu agama dalam membuka dialog agama-agama dari basis kultural historis untuk menjaga relasi kritis umat beragama. Victor Rembeth dalam buku ini mengupas pemikiran Th. Sumartana melalui pandangan teologis, posisi kultural, dan sikap politik yang

dihidupi Sumartana terkait relasi rumit agama dan negara. Utamanya, buku ini menawarkan model demokratisasi baru dimana agama-agama dijadikan sebagai instrumen utama pelaku proses demokratisasi tersebut. Menyoroti peran dialog agama-agama sebagai *counter culture* dalam menghadirkan demokratisasi negara serta alternatif penguatan toleransi moderasi antar umat beragama.

PENUTUP

Setelah menelaah buku ini, pembahasannya kembali menyadarkan satu hal menarik yang sering terabaikan bahwa akibat dominasi negara pada segala lini termasuk ruang agama membuat kereligiusan dan ketulusan memeluk agama oleh individu di Indonesia dalam prakteknya hanya dilandasi oleh urusan formal negara, memenuhi status quo sebagai warga negara, bukan inisiatif/kesadaran kritis sebagai umat beragama. Begitupula ketulusan dalam menentukan hubungan antar umat beragama. Apalagi ketika kebanyakan kebijakan disentralisasikan pada Islam. Agama hanya hadir sebagai legitimasi atau pembenaran. Relasi umat antar-agama muncul hanya ketika saling butuh sebagai formalitas, tapi tidak melibatkan inisiatif dialog tulus antar-agama, alhasil dinamika konflik/isu agama tetap menjadi bola api liar.

Disayangkan penulis kurang menyelam lebih dalam pada isu strategis berikut, tapi justru memantik diskusi menarik dari buku ini yakni, alasan mengapa agama sulit menempatkan diri dan melebur dengan nilai lokal dimana agama tersebut berkembang, yang marak justru agama menjadi entitas terpisah (dogmatis) yang bersebrangan dari kehidupan budaya setempat. Hal ini dapat dilihat dalam konteks: predikat agama radikal, atau ajaran yang mengharamkan/menghapus tradisi. Analisis persoalan antara gereja suku dengan identitas ke-Indonesiaan yang tarik-menarik. Tidak jarang penyebaran agama mengalami penolakan sebab dianggap menjadi teror budaya. Seandainya agama dan budaya berjalan beriringan akan tercipta umat agama yang modern sekaligus berakar pada budaya.

Catatan kritis lain yang perlu diperhatikan adalah ungkapan-ungkapan kontroversial yang memicu selisih paham seperti: Pertama, dalam buku menyebut kondisi Indonesia layak disebut negeri seribu satu konflik yang memperlemah potensi *civil society* (hal 262). Menyebut secara tersirat bahwa semua produk demokrasi (terpimpin, Pancasila, dan demokrasi orde reformasi) merupakan usaha gagal yang belum mampu mencapai esensi dasar konsep demokrasi (hal 260). Kedua, berargumen bahwa paradoks lahirnya berbagai komunitas dialog antar iman justru dibarengi kecenderungan menguatnya komunalisme dan tribalisme yang memupuk sektarianisme (hal. 268). Atau sebaliknya kelompok antar iman dapat menjerumuskan ketika anggota tidak lagi menghayati kepercayaan masing-masing, justru melebur menjadi sebuah agama/kepercayaan baru (hal 273). Ketiga, istilah "Open Islam (usulan Bassam Tibi)" atau "Open Protestantism" sebagai konsep identitas agama terbuka yang

ditemukan Sumartana pada figur Kiai Sadrach (hal 266) memicu perdebatan terkait sejauh mana indikator atau parameter sebuah agama dikatakan agama terbuka. Selain itu, buku ini tergolong bacaan kritis yang menggunakan diksi bahasa level menengah-tinggi dan beberapa terminologi yang asing bagi orang umum.

Terlepas dari kekurangan, buku ini sangat layak masuk rekomendasi daftar bacaan bagi banyak kalangan, para penyelenggara negara, aktivis isu toleransi dan pluralitas beragama, tokoh agama, akademisi dan mahasiswa. Buku ini layak menjadi sumber inspirasi dalam memerangi dominasi kekuasaan yang mengganggu relasi antar agama, serta mengurai dinamika konflik bernuansa agama, khususnya antara Kristen dan Islam di Indonesia.

DAFTAR ACUAN

- Gultom, C. M. (2021). Kriminalisasi ulama dalam teori kekuasaan studi tentang teori kekuasaan Michel Foucault dalam kasus kriminalisasi Kyai Sadrach di era penjajahan Belanda. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologidan Pendidikan Kristen, Vol. 2, No. 1.*
- Kaha, S. C. (2020). Dialog Sebagai kesadaran relasional antar agama: respons teologis atas pudarnya semangat toleransi Kristen-Islam di Indonesia. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja, Vol. 4, No. 2, 145.*
- Nggebu, S. (2023). Mengaktualisasikan strategi pelayanan misi kontekstual Kiai Sadrach di era postmodern. *KURIOS Jurnal Teologi dan pendidikan Agama Kristen, Vol. 9, No. 2, 378.*
- Sumartana, T. (1993). *Missions At The Crossroads: Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association and Socio-Religious Change in Java 1812-1936*. Jakarta: BKP Gunung Mulia.
- Sumartana, T. (1994). *Dialog dan Nilai Budaya Masyarakat Indonesia Abad 21*. Bandung: makalah dalam Diskusi Ikatan Sarjana Katolik Indonesia.
- Sumartana, T. (2002). *Agama, Politik, dan Negara: Perspektif Agama-agama Abrahamik*. Yogyakarta: Dian.
- Sumartana, T. (2003). *Sekelumit Sejarah Gereja Protestan dalam Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*. Yogyakarta: Interfidei.
- Sumartana, T. (2003). "Theologia Religionum, Sebuah Pengantar Umum" dalam Tim Balitbang PGI: *Meretas Jalan Teologi Agama-agama di Indonesia*. Jakarta: BKP Gunung Mulia.